

**ANALISIS TATA KELOLA (GOVERNANCE) ASET DESA
DALAM PERSPEKTIF SOSIAL BUDAYA****Andriyawan E. Karim¹, Usman²**

Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo

andriyawanekarim580@gmail.com¹, usman.aman44@yahoo.com²**ABSTRACT**

This study aims to critically examine and evaluate governance surrounding village assets, not only from the perspective of conventional regulations but through a broader socio-cultural lens. The research focuses on understanding how local cultural values—including gotong royong (mutual cooperation), musyawarah (deliberation), social relations, and the role of traditional leaders—influence the effectiveness of village asset management. The methodology employed in this investigation involves the Systematic Literature Review (SLR) technique, complemented by an analysis of regulatory documents related to village asset management. This methodological framework is used to identify research gaps and to elaborate theoretical constructs related to governance, social capital, and indigenous wisdom. The findings reveal that village asset governance in Indonesia largely remains concentrated on procedural and administrative dimensions (such as inventory, documentation, and reporting), which are often hindered by limited capacities at the village government level. A major research gap is identified in the insufficient integration of sociocultural elements within existing studies. Indeed, local values such as musyawarah and gotong royong have been shown to play a significant role as catalysts—particularly in terms of legitimacy and participation—in oversight and decision-making processes involving village assets. Nevertheless, patron-client dynamics also pose risks of creating inequalities in information dissemination and decision-making. The study concludes that the effectiveness of village asset management depends on the synergistic interaction between Formal Governance (including transparency, accountability, and oversight) and Socio-Cultural Factors (including participation, legitimacy, and social monitoring). It is essential to design adaptive governance models capable of seamlessly integrating local wisdom into formal regulatory structures in order to facilitate sustainable and accountable asset management that aligns with the specific contexts of village communities.

Keywords: *governance; village assets; socio-cultural; SLR; governance***ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk secara kritis memeriksa dan mengevaluasi tata kelola di sekitar aset desa, tidak hanya dari sudut pandang peraturan konvensional, tetapi lebih melalui lensa sosial-budaya yang luas. Penelitian

ini berfokus pada pemahaman pengaruh nilai-nilai budaya lokal (termasuk gotong royong, musyawarah, hubungan sosial, dan signifikansi tokoh adat) terhadap kemandirian pengelolaan aset desa. Metodologi yang digunakan dalam penyelidikan ini melibatkan teknik Systematic Literature Review (SLR) yang dilengkapi dengan analisis dokumen peraturan yang berkaitan dengan manajemen aset desa. Kerangka metodologis ini digunakan untuk menjelaskan kekurangan penelitian dan untuk menggambarkan konstruksi teoritis yang terkait dengan pemerintahan, modal sosial, dan kebijaksanaan adat. Temuan menunjukkan bahwa tata kelola aset desa di Indonesia sebagian besar tetap terkonsentrasi pada dimensi prosedural dan administratif (seperti inventaris, dokumentasi, dan pelaporan), yang sering terhambat oleh keterbatasan kemampuan pemerintah desa. Kekurangan penelitian utama diidentifikasi dalam integrasi elemen sosiokultural yang tidak memadai dalam studi yang ada. Memang, nilai-nilai lokal seperti musyawarah dan gotong royong telah terbukti memainkan peran penting sebagai katalis (dalam hal legitimasi dan partisipasi) dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan mengenai aset. Namun demikian, dinamika klien-pelindung juga menghadirkan potensi untuk menimbulkan ketidaksetaraan dalam penyebaran informasi dan pengambilan keputusan. Studi ini menyimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan aset desa bergantung pada interaksi sinergis antara Tata Kelola Formal (meliputi transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan) dan Faktor Sosial-Budaya (termasuk partisipasi, legitimasi, dan pemantauan sosial). Sangat penting untuk merancang model tata kelola adaptif yang mampu mengintegrasikan kebijaksanaan lokal dengan mulus dalam struktur peraturan formal, untuk memfasilitasi manajemen aset yang berkelanjutan dan akuntabel yang selaras dengan konteks spesifik komunitas desa.

Kata Kunci: governance; aset desa; sosial budaya; SLR; tata kelola

A. PENDAHULUAN

Tata kelola aset pedesaan sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya. Setelah diberlakukannya *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, (2014), desa memperoleh wewenang yang diperluas atas kekayaan mereka, termasuk berbagai jenis aset. Meskipun demikian, pengelolaan aset pedesaan terus menghadapi banyak hambatan struktural dan budaya. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa persoalan umum dalam pengelolaan aset desa meliputi lemahnya sistem inventarisasi, kurang optimalnya pemanfaatan aset, dan minimnya pengawasan internal Sulistio & Rahmawati, (2020). Selain itu, akuntabilitas pelaporan aset desa sering tidak berjalan efektif karena keterbatasan kapasitas aparatur serta kurangnya pemahaman mengenai regulasi pengelolaan aset Iskandar & Mustofa, (2021). Dari sisi sosial budaya, nilai-nilai lokal seperti gotong

royong, relasi patron klien, peran tokoh adat, dan budaya musyawarah memiliki pengaruh signifikan terhadap bagaimana aset desa dikelola. Beberapa penelitian menyatakan bahwa praktik sosial budaya dapat memperkuat partisipasi masyarakat sekaligus menciptakan potensi konflik kepentingan apabila tidak diatur secara jelas dalam struktur governance desa Subroto & Sari, (2020). Dengan demikian, tata kelola aset desa perlu dianalisis tidak hanya dari perspektif regulasi formal tetapi juga dari perspektif sosial budaya sebagai bagian dari realitas masyarakat desa. Sebagian besar studi tata kelola aset desa di Indonesia masih berfokus pada aspek procedural seperti pencatatan, pemanfaatan, dan pengawasan berbasis regulasi. Sementara itu, kajian mengenai bagaimana faktor sosial budaya memengaruhi efektivitas tata kelola aset desa masih sangat terbatas, terutama dalam konteks desa-desa di wilayah dengan karakter adat yang kuat. Padahal, nilai-nilai sosial budaya berpotensi menjadi kekuatan pendorong governance atau sebaliknya menjadi penghambat jika tidak dikelola dengan tepat.

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji tata kelola aset desa dari perspektif sosial budaya, dengan tujuan memahami bagaimana budaya lokal, praktik gotong royong, relasi sosial, dan struktur kepemimpinan tradisional memengaruhi pengelolaan aset desa. Analisis ini diharapkan dapat memperkaya literatur governance desa sekaligus memberikan rekomendasi yang lebih kontekstual bagi pemerintah desa.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi Systematic Literature Review (SLR) yang dilengkapi dengan pemeriksaan dokumen peraturan, seperti yang digambarkan dalam tinjauan literatur dan dirangkum dalam file yang menyertainya. Metodologi ini dipilih untuk menggambarkan konstruksi tata kelola desa, modal sosial, pengetahuan adat, di samping dinamika sosial budaya yang berkaitan dengan pengelolaan aset desa Zheng et al., (2024).

1. Identifikasi Literatur

Tahap pertama dilakukan dengan menghimpun berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan tema tata kelola aset desa, budaya lokal, dan governance publik. Literatur yang dianalisis mencakup:

- penelitian terkait pengelolaan aset desa seperti Sulistio & Rahmawati, (2020) dan Iskandar & Mustofa, (2021)
- kajian budaya dan antropologi seperti Koentjaraningrat, (2009) dan Geertz, (1983)
- teori modal sosial oleh (Putnam, 1993)

- teori partisipasi oleh (Arnstein, 1969)
- teori governance oleh (Programme, 1997)

Pendekatan identifikasi ini sesuai dengan prinsip SLR menurut (Snyder, 2019) yang menekankan proses sistematis dalam menemukan temuan kunci dari penelitian terdahulu.

2. Seleksi Literatur

Literatur yang terkumpul diseleksi berdasarkan kriteria:

- relevan dengan topik tata kelola aset desa,
- membahas aspek sosial budaya,
- memiliki kualitas akademik memadai,
- mendukung pembentukan variabel dan kerangka teori penelitian.

Proses seleksi mengikuti pedoman Cahyani, (2024) tentang tahapan SLR dalam penelitian sosial.

3. Analisis dan Sintesis Temuan

Analisis dilakukan dengan pendekatan thematic analysis, yaitu memetakan tema-tema besar berdasarkan isi literatur:

- Governance formal seperti inventarisasi, pemanfaatan, dan pengawasan aset Mahmudi, (2010)
- Nilai sosial budaya seperti gotong royong, musyawarah, patron klien, dan peran tokoh adat Koentjaraningrat, (2009) Subroto & Sari, (2020)
- Kearifan lokal sebagai legitimasi sosial dalam governance Geertz, (1983)
- Modal sosial dalam mendukung pengawasan informal berbasis komunitas Putnam, (1993)
- Partisipasi masyarakat sebagai bagian dari tangga partisipasi Arnstein, (1969).

Analisis sintesis dilakukan untuk menemukan hubungan antarvariabel, sebagaimana metode SLR dijelaskan oleh Arnstein, (1969).

4. Analisis Dokumen Regulasi

Selain literatur akademik, penelitian ini juga menganalisis dokumen regulasi dan kebijakan, termasuk:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
- pedoman tata kelola aset,
- teori manajemen aset publik oleh Mahmudi (2010),

- standar governance oleh UNDP (1997).

Analisis regulasi digunakan untuk melihat kesenjangan antara governance formal dan praktik sosial budaya sebagaimana dibahas oleh Sulistio & Rahmawati, (2020) dan Iskandar & Mustofa, (2021)

5. Penyusunan Kerangka Pemikiran

Hasil sintesis literatur digunakan untuk menyusun kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan:

- Governance formal → transparansi → akuntabilitas → pengawasan,
- Budaya lokal & kearifan lokal → partisipasi → legitimasi → pengawasan sosial,

Kedua faktor tersebut bersama-sama membentuk efektivitas pengelolaan aset desa Subroto & Sari, (2020). SLR sebagai pendekatan memungkinkan penyusunan kerangka konseptual yang kuat, sesuai penjelasan Snyder, (2019) mengenai pentingnya memetakan gap penelitian dan menyusun pola hubungan antarvariabel.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa tata kelola (governance) aset desa tidak hanya ditentukan oleh regulasi formal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh konteks sosial budaya masyarakat desa. Kombinasi kedua aspek tersebut membentuk dinamika pengelolaan aset yang berbeda antar desa. Pembahasan berikut merangkum temuan utama berdasarkan analisis literatur dan dokumen regulasi.

1. Governance Formal dalam Pengelolaan Aset Desa

Secara normatif, pengelolaan aset desa harus mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam UU Desa serta pedoman pengelolaan aset negara Mahmudi, (2010). Namun, literatur seperti Sulistio & Rahmawati, (2020) dan Iskandar & Mustofa, (2021) menunjukkan adanya ketimpangan antara aturan formal dan implementasi administratif di desa.

Beberapa kendala yang ditemukan meliputi:

- ketidaktepatan pencatatan aset,
- lemahnya inventarisasi,
- rendahnya kapabilitas aparatur dalam memahami prosedur regulatif,
- kurang optimalnya mekanisme pelaporan.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersusun rapi, kapasitas aparatur dan dukungan sistem belum sepenuhnya memadai.

2. Budaya Lokal sebagai Faktor Penguat atau Penghambat Governance

File terlampir memberikan penekanan kuat bahwa pengelolaan aset desa tidak dapat dipahami hanya dari sudut pandang administratif. Nilai-nilai budaya seperti gotong royong, musyawarah, relasi patron-klien, dan peran tokoh adat memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas governance. Menurut Koentjaraningrat, (2009), budaya adalah sistem nilai yang mengatur pola tindakan masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan Subroto & Sari, (2020) yang menyatakan bahwa budaya dapat menjadi kekuatan sosial yang mendorong partisipasi, tetapi juga dapat menjadi hambatan bila struktur sosial terlalu hierarkis.

Beberapa contoh pengaruh budaya lokal:

- musyawarah memperkuat legitimasi keputusan pengelolaan aset,
- gotong royong mempermudah pemanfaatan aset untuk kepentingan bersama,
- dominasi tokoh adat dapat mempercepat keputusan, tetapi juga berpotensi menutup ruang partisipasi.

3. Modal Sosial dan Pengawasan Sosial dalam Pengelolaan Aset

Literatur dalam file merujuk pada teori Putnam, (1993) mengenai modal sosial sebagai perekat sosial yang memperkuat kerja kolektif. Modal sosial masyarakat desa berperan dalam membentuk mekanisme pengawasan informal (social control) terhadap aset desa.

Dalam konteks ini:

- tingginya kepercayaan antarwarga memperkuat mekanisme pengawasan nonformal,
- jaringan sosial mempermudah koordinasi pemanfaatan aset,
- norma kolektif membangun kepatuhan terhadap aturan desa.

Namun, pada desa dengan modal sosial rendah, terjadi:

- rendahnya keterlibatan warga,
- lemahnya transparansi publik,
- tingginya potensi penyalahgunaan aset.

4. Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Aset Desa

Mengacu pada Arnstein, (1969) partisipasi masyarakat berada pada spektrum mulai dari informatif hingga kendali warga (*citizen control*). File menunjukkan bahwa banyak desa berada pada jenjang *tokenism* (partisipasi simbolis), di mana masyarakat diberi informasi tetapi tidak terlibat dalam pengambilan keputusan.

Literatur seperti Subroto & Sari, (2020) mencatat bahwa partisipasi yang rendah disebabkan oleh:

- minimnya akses informasi,
- dominasi elite lokal,
- rendahnya kapasitas literasi regulatif masyarakat.

Padahal, partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci keberhasilan pengawasan aset desa.

5. Kesenjangan antara Regulasi dan Praktik Lapangan

Analisis regulasi mengungkap bahwa aturan pengelolaan aset desa telah disusun secara komprehensif. Namun, pada praktiknya muncul berbagai kesenjangan, seperti:

- implementasi pengawasan tidak berjalan sesuai standar,
- aset desa tidak termanfaatkan optimal,
- proses dokumentasi tidak akurat,
- nilai budaya tidak diintegrasikan dalam prosedur formal.

Sebagaimana ditegaskan oleh Iskandar & Mustofa, (2021) kesenjangan ini muncul karena regulasi tidak sepenuhnya mempertimbangkan dinamika sosial budaya desa.

6. Integrasi Governance Formal dan Budaya Lokal

Sintesis literatur dalam file menunjukkan bahwa integrasi governance formal dengan budaya lokal menghasilkan tata kelola aset yang lebih efektif. Ketika budaya lokal seperti musyawarah dan gotong royong diperkuat dengan prosedur formal, maka:

- transparansi meningkat,
- legitimasi keputusan bertambah,
- pengawasan sosial dan administratif saling melengkapi.

.

Sebaliknya, jika keduanya tidak terintegrasi, maka tata kelola dapat menjadi timpang: secara administratif tertata tetapi secara sosial tidak diterima.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset desa tidak semata-mata diatur oleh peraturan formal tetapi juga secara signifikan dibentuk oleh nilai-nilai sosial budaya. Unsur-unsur seperti gotong royong, musyawarah, hubungan sosial, dan pengaruh pemimpin adat memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan mengenai aset desa. Kerangka pemerintahan yang secara efektif mengintegrasikan kearifan lokal dengan struktur peraturan formal sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan aset desa beroperasi dengan cara yang lebih efisien, adaptif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Cahyani, A. (2024). *Systematic Literature Review dalam Penelitian Sosial*.
- Geertz, C. (1983). *Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology*. Basic Books.
- Iskandar, R., & Mustofa, A. (2021). *Pengelolaan aset desa dan tantangannya*.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Aset Publik*. UPP STIM YKPN.
- Programme, U. N. D. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. UNDP.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
- Snyder, H. (2019). Literature Review as a Research Methodology. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Subroto, A., & Sari, R. (2020). *Pengaruh Sosial Budaya terhadap Governance Desa*.
- Sulistio, T., & Rahmawati, D. (2020). *Permasalahan Inventarisasi Aset Desa*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014).
- Zheng, X., Herman, S. S. B., Salih, S. A., & Ismail, S. B. (2024). Sustainable Characteristics of Traditional Villages: A Systematic Literature Review Based on the Four-Pillar Theory of Sustainable Development. *Sustainability*, 16(23), 10352.